

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era globalisasi sekarang ini, perdagangan semakin penting peranannya, dimana batas administrasi negara menjadi samar. Segala fenomena dapat dijadikan sebuah peluang untuk meraih devisa yang cukup untuk negeri ini. Dalam Hubungan Internasional diajarkan bahwa untuk meningkatkan ekonomi suatu negara dapat dilakukan dengan cara mengadakan kerjasama bilateral maupun multilateral dengan negara lain. Dengan adanya hubungan kerjasama tersebut tentunya akan diketahui kepentingan negara tersebut dan adanya hubungan perdagangan untuk mencapai kepentingan yang diinginkan. Kerjasama tersebut merupakan perpanjangan dari kepentingan nasional sebuah negara. Hubungan kerjasama dalam bidang perdagangan dapat meningkatkan perekonomian negara tersebut sekaligus juga menjalin hubungan baik dengan negara yang bersangkutan.

Perdagangan pada umumnya adalah merupakan suatu proses kegiatan ekonomi yang sangat penting. Perdagangan yang dilaksanakan baik antardaerah (interregional) maupun antarnegara (Internasional) merupakan suatu cara penting untuk meningkatkan taraf hidup dan kemakmuran bagi bangsa-bangsa atau negara yang bersangkutan.

Aspek pembangunan di dalam suatu negara atau kelompok negara hanya dapat terjadi dalam kawasan tertentu saja. Pembangunan kemudian merupakan bagian dari tanggung jawab yang harus diselesaikan bersama. Perkembangan suatu negara dalam memenuhi kebutuhannya tidak lepas dari perdagangan antarbangsa. Hal ini juga tidak bisa dipisahkan dalam Hubungan Internasional. Kebutuhan untuk melaksanakan model pembangunan berkelanjutan ini telah cukup mendesak mengingat model pembangunan konvensional tidak mengatasi masalah yang berkenaan dengan lingkungan¹.

Kebutuhan untuk keluar dari pola pembangunan konvensional dan memasuki pola pembangunan berkelanjutan makin mendesak. Disebabkan pembangunan konvensional yang tidak mengakomodasi aspek lingkungan di satu pihak berhasil menaikkan produksi barang dan jasa secara melimpah, tetapi di pihak lain menimbulkan ketimpangan pendapatan penduduk antar dan dalam negara. Terhadap lingkungan, dampak pembangunan konvensional begitu dahsyat sehingga pengaruhnya tidak lagi dalam batas lokal dan nasional, melainkan mencakup regional dan global yang mengancam kehidupan manusia².

Pembangunan sektor pertambangan pada hakekatnya merupakan upaya pengembangan sumber daya alam mineral dan energi yang potensial untuk dimanfaatkan secara hemat dan optimal bagi kepentingan masyarakat. Hal

¹ Didik j. Rachbini, kebijakan dan strategi pembangunan, hal 147

² Prof Dr Emil, sarasehan Penguatan Kelompok Masyarakat dalam Pembangunan Berkelanjutan, Jakarta, 2003.

tersebut juga harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. Bahan galian yang paling banyak dieksploitir selama ini dan telah banyak diusahakan secara besar-besaran oleh pemerintah adalah timah.

Timah adalah sebuah unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki simbol **Sn** (bahasa Latin: *Stannium*) dan nomor atom 50. Unsur ini merupakan logam miskin keperakan, dapat ditempa ("*malleable*"), tidak mudah teroksidasi dalam udara sehingga tahan karat, ditemukan dalam banyak aloy, dan digunakan untuk melapisi logam lainnya untuk mencegah karat³. Timah juga merupakan bahan tambang utama yang berada di Bangka. Timah ini sudah dieksploitasi sejak ratusan tahun silam oleh bangsa kolonial Belanda. Dan sekarang ini dikelola oleh pemerintah Indonesia melalui dua anak perusahaan swasta yakni PT Timah Tbk dan PT Kobatin. Dalam pemanfaatannya, bijih timah telah banyak mengalami peningkatan, terutama dalam memenuhi kebutuhan pasar nasional maupun dunia.

Penambangan timah di Pulau Bangka merupakan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang sampai saat ini merupakan penyumbang devisa negara dan pendapatan daerah terbesar di Pulau Bangka. Akan tetapi, aktivitas penambangan timah yang besar-besaran dan tidak terkontrol baik oleh penduduk ataupun perusahaan tambang timah di Pulau Bangka menimbulkan permasalahan pengrusakan lingkungan yang semakin parah dan memprihatinkan antara lain, terbentuknya kolong (lubang bekas penggalian tambang yang mengandung logam-logam terlarut berbahaya yang tidak dapat

dimanfaatkan dalam kurun waktu yang cukup panjang.

Saat ini, di Pulau Bangka terdapat lebih dari seribu kolong akibat penambangan timah yang tidak adanya pengendalian tambang timah inkonvensional. Akibat penambangan timah yang tidak terkendali dan lambannya tindakan reklamasi terhadap lingkungan yang sekarang ini berada diambang kehancuran. Ada hal yang menarik yang perlu diperhatikan sampai sekarang adalah ribuan Tambang Inkonvensional (TI) yang beroperasi di daerah tambang mengakibatkan kerusakan lingkungan dan pencemaran limbah galian timah. Dalam jangka panjang, hal ini sangat membahayakan dan memperparah kondisi lingkungan di Pulau Bangka.

Sektor pertambangan timah masih cukup besar peranannya bagi perekonomian daerah. Namun sebagaimana yang kita ketahui, timah sebagai bahan galian tambang yang tidak dapat diperbaharui pada suatu saat akan habis. Oleh karena itu, prioritas pembangunan “Pasca Timah” perlu secepatnya diantisipasi. Dalam mengambil antisipasi ini, maka aparaturnya pembangunan wilayah harus memiliki otoritas dan kewenangan yang besar dalam perencanaan dan pembangunan daerah yang mengacu kepada kondisi objektif dan peluang yang dapat diraih oleh daerah tersebut. Kini hasil Perdagangan Timah sudah menebus Pasar Internasional baik Dalam Negeri maupun Luar Negeri, adapun negara tujuan ekspor terutama negara-negara di Asia dan Eropa.

Untuk mempertahankan keberadaan komunitas ekspor timah di pasaran

³ Id.wikipedia.org/wiki/Timah - 36k

internasional, khususnya pasar Asia dan Eropa. Maka dibutuhkan politik perdagangan internasional. Politik perdagangan internasional yaitu strategi apa yang dilakukan industri untuk memasuki dan meningkatkan komunitas ekspor hasil industri yang digali dari bumi serta mengembangkan perdagangan internasionalnya. Untuk itu, strategi keterbukaan dengan selalu memperbaiki iklim usaha secara sehat dan dinamis merupakan kondisi yang perlu diciptakan dan dijaga terus menerus.

Secara eksplisit perbedaan sifat Sumber Daya Alam harus diperhitungkan. Sumber Daya Alam yang tidak dapat diperbarui seperti bahan tambang memiliki manfaat yang dibatasi waktu dan volumenya akan mengalami *depleksi* (pengurasan) dalam proses penggaliannya. Sebesar-besarnya hasil tambang yang dikandung di daerahnya suatu saat akan habis tergali. Contohnya adalah Timah di Pulau Bangka, akan terkuras habis dalam 25 tahun. *Depleksi* harus diperhitungkan agar pembangunan Bangka bisa berlanjut. Laju *depleksi* bahan timah itu harus dikenai *depletion rent* sebagai modal substitusi tambang timah yang habis untuk di investasikan dalam kegiatan berbasis Sumber Daya Alam yang diperbaharui seperti pertanian, perkebunan, perikanan, pariwisata, dan pengembangan sumber daya manusia. Ketika penambangan timah berakhir, maka ekonomi Bangka bisa berlanjut karena terbangun motor-motor ekonomi baru yang bertumpu pada sumber daya alam yang diperbaharui.

Semua sumber daya alam diperlakukan sama sehingga penipisan sumber

daya alam tambang tidak diperhitungkan atau tanpa pola keberlanjutan. Jika kemudian timah Bangka habis pada tahun 2025. Maka yang tersisa adalah kota yang tidak berpotensi, dalam arti kota hantu. Keterlibatan masyarakat sangat esensial dalam pembangunan berkelanjutan, tetapi saat ini masih terbatas dan belum menjadi suatu gerakan. Untuk mendorong partisipasi masyarakat. Dibutuhkan suatu wahana untuk menyebarkan informasi mengenai pembangunan berkelanjutan dan isu lingkungan global. Selain itu, diperlukan penguatan jaringan masyarakat untuk dapat berperan dalam pembangunan berkelanjutan.

Di tingkat daerah, maraknya Tambang Inkonvensional (TI) dipicu oleh terbitnya Surat Keputusan (Skep) Bupati Bangka No 540.K/271/Tamben/2001 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan untuk Pengolahan dan Penjualan (ekspor). Keputusan Menperindag Nomor 294/MPP/Kep/10/2001 yang tidak memuat tata niaga komoditas timah sebagai barang yang diatur. Misalnya, ditafsirkan bahwa timah adalah barang bebas yang perdagangannya tidak diawasi ataupun dilarang. UU No 22/1999 tentang Pemerintah Daerah juga hanya dipahami sebagai kebebasan daerah untuk mengelola mineral yang ada di wilayahnya. Contoh tumpang tindih kebijakan lainnya adalah aturan Kep.men-Perindag No 443/MPP/ Kep/5/2002 tentang larangan ekspor timah berbentuk bijih (pasir) dengan Skep Bupati Bangka No 540.K/271/Tamben/2001 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan untuk Pengolahan dan Penjualan (ekspor).

Mengingat konflik antara stakeholder, seperti pemerintah, masyarakat

yang melakukan tambang inkonvensional dan perusahaan tambang terbesar terhadap pentingnya timah sebagai komoditi strategis yang sangat menguntungkan walau berorientasi kepada ekonomi jangka pendek dan sangat merusak lingkungan, mungkin cukup rumit untuk mengontrol penambangan timah inkonvensional. Perusahaan besar pada umumnya sudah harus mematuhi peraturan lingkungan yang sudah ditetapkan.

Pihak yang terkait seperti, stakeholder di Pulau Bangka sebenarnya sudah menyadari sangat diperlukannya reklamasi untuk perbaikan kondisi lingkungan. Selain itu, sudah ada kebijakan Pemerintah Daerah Bangka yang menyatakan bahwa pengusaha wajib melakukan pengendalian dan pencegahan pencemaran, namun implementasi di lapangan cukup sulit. Oleh karena itu, perlu dikembangkan teknologi untuk perbaikan lingkungan yang mudah diimplementasi, ekonomis, dan efisien.

Dengan kesadaran yang tinggi, dari stakeholder dan kebijakan baru dari pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas timah dan lingkungan di Pulau Bangka serta mengingat banyaknya *stakeholder* (perusahaan yang mengelola timah) seperti PT.Timah dan pengusaha lainnya dengan asset besar di Pulau Bangka. Sebenarnya aplikasi *instut treatment* dengan *limestone* atau *passive treatment* cukup ekonomis untuk diterapkan. Walaupun kadang perbaikan untuk kualitas lingkungan memang harus dibayar dengan mahal, reklamasi harus dilakukan sebelum kerusakan lingkungan bertambah parah dan menimbulkan dampak yang lebih besar yang akan memakan biaya yang lebih besar lagi.

Dari sisi regulasi, maraknya penambangan tanpa izin (PETI) atau Tambang Inkonvensional (TI) dan juga potensi konflik yang diakibatkannya tak bisa dilepaskan dari kebijakan pemerintah, seperti tumpang tindih antar peraturan daerah (Perda) satu dengan Perda lainnya atau antara Perda dan Peraturan yang lebih tinggi. Pemerintah RI selama ini melanjutkan kebijakan di masa kolonial, menjadikan timah sebagai komoditas strategis yang pengusahaannya berada di bawah kendali negara.

Kebijakan Otonomi daerah dan munculnya Kebijakan Pemerintah Pusat tersebut yang menetapkan timah bukan barang strategis memberikan peluang kepada masyarakat untuk mengelola dan mengeksploitasi timah secara bebas. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Bangka dalam menghadapi gejala dan fenomena tersebut harus bersikap untuk menetapkan bahwa kebijakan pengelolaan timah harus segera diatur secara ekonomis dan berkelanjutan.

Kebijakan Pemerintah Pusat yang tidak konsisten menimbulkan ketidakpastian regulasi dan mendorong konflik antar instansi pemerintah. Kebijakan yang menetapkan pasir timah sebagai komoditi bebas menyebabkan pesatnya pertumbuhan pertambangan inkonvensional dan ekspor pasir timah menengah dan kecil tanpa reklamasi lingkungan. Dalam penambangan ini masyarakat dan pemerintah lokal mendapat penghasilan lebih besar dibandingkan PT.Timah dan PT.Kobatin. Bagaimanapun penambangan liar harus ditertibkan, sebagaimana penertiban terhadap industri-industri skala

besar yang seringkali mengabaikan tanggungjawab lingkungannya.

Berbicara tentang kebijakan pertimahan di Bangka Belitung bukanlah persoalan baru (*recent*), melainkan persoalan yang klasik, namun pada dekade ini terus menerus aktual dibicarakan oleh berbagai kalangan dan seluruh lapisan masyarakat termasuk di Perguruan Tinggi, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Non-Governmental Organization (NGO), dll⁴. Strategi ini akan semakin terbuka dimana adanya sistem perdagangan bebas yaitu keluar masuk dari satu negara ke negara yang lain tanpa hambatan.

Agar semakin menjadi penggerak utama ekonomi yang efisien, berdaya saing tinggi, mempunyai struktur yang kukuh dengan pola produksi semakin berkembang dari barang-barang yang mengandalkan pada tenaga kerja produktif dan sumber daya alam melimpah menjadi barang bermutu, bernilai tambah tinggi dan padat karya yang membutuhkan keterampilan⁵. Dari satu negara dengan negara yang lain dalam melakukan kerjasama memerlukan hubungan yang baik.

Kondisi negara-negara secara ekonomis berbeda. Hal ini disebabkan karena perbedaan kondisi alam serta kualitas produk tingkat teknologi. Perbedaan suatu negara dengan negara lain karena perbedaan faktor produksi yang dimiliki dan mempunyai tenaga kerja lebih banyak dari negara tersebut. Dari perbedaan ini maka perlu adanya Perdagangan Internasional.

⁴ www.bangkawww.bangka.go.id, Kebijakan pertambangan timah (antara das sein dan das sollen). Oktober 2006

⁵ Dikutip dari : *Bangka Dalam Angka 2002 (Kerjasama Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka*

Dengan berlangsungnya Perdagangan Internasional pada akhirnya akan menyamakan harga faktor-faktor produksi di negara-negara perdagangan, serta meningkatkan produk nasional masing-masing negara, volume perdagangan antarnegara dan pada gilirannya meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdagangan.

Untuk memperlancar sistem perdagangan tersebut maka dibentuklah WTO (*World Trade Organization*). WTO yaitu suatu organisasi perdagangan dunia yang berfungsi untuk mengatur dan memfasilitasi Perdagangan Internasional yang mempunyai tujuan untuk menciptakan persaingan sehat di bidang Perdagangan Internasional. Selain itu juga bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan pendapatan, menjamin terciptanya lapangan pekerjaan, meningkatkan produksi dan perdagangan serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dunia.

Dengan demikian, politik perdagangan merupakan suatu cara untuk menentukan tujuan-tujuan dagang tersebut. Karena peranan perdagangan dalam negeri sangat penting dalam memperlancar arus barang dan jasa melalui efisiensi sistem distribusi dan ekspedisi nasional guna mendukung kelancaran barang ekspor. Untuk itu perlu upaya mendorong kelancaran arus barang dan jasa yang lebih cepat dan tepat waktu dengan didukung oleh sistem distribusi dan ekspedisi yang semakin efisien. Sehingga Pemerintah Indonesia memerlukan adanya politik perdagangan luar negeri serta mengeluarkan kebijakan dalam membangun dan menangani perekonomian melalui produk

timah tahun 2007.

B. Pokok Permasalahan

Dari uraian diatas timbul suatu permasalahan yaitu: “*Bagaimana Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam menangani produk timah di Bangka Belitung tahun 2007?*”.

C. Kerangka Dasar Pemikiran

Permasalahan dalam studi ini pada dasarnya berkaitan dengan bentuk perdagangan antara kedua negara atau daerah yakni pertukaran barang yang dilakukan antardaerah atau negara yang berkaitan dengan hasil tambang yang dilakukan Pemerintah Indonesia dalam menangani produk timah khususnya di Daerah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung. Maka dari itu saya menggunakan teori *Decision Making Process*.

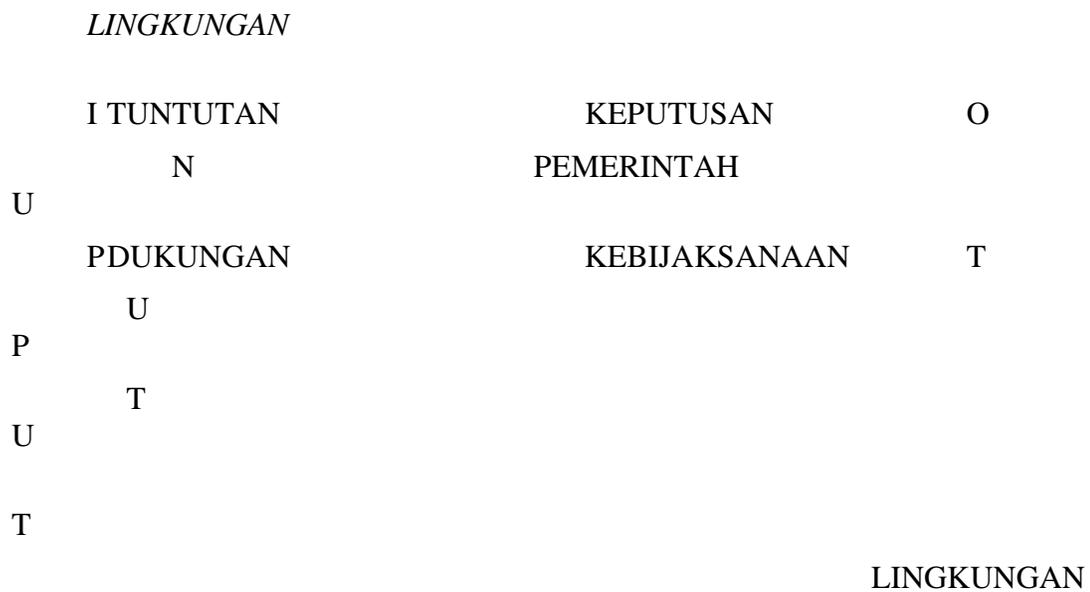
Teori Decision Making Process

Dalam membuat dan melaksanakan kebijakannya, menurut *Teori Decision Making Process* oleh David Easton terdapat beberapa faktor, diantaranya adalah Pemerintah, kepentingan individu-individu dan kelompok dalam masyarakat yang harus disatukan menjadi sebuah kebijakan. Sehingga dalam penerapan kebijakan pemerintah, sesuatu yang disebut output dapat mempengaruhi kehidupan Ekonomi, struktur sosial, dan kebudayaan dari

masyarakat domestik.⁶

Gambar 1.1

Decision Making Process menurut David Easton



Sumber ; Perbandingan sistem politik, Mohtar Mas' oed, Colin Mac Andrews, UGM Press, hal 5.

Menurut David Easton, munculnya suatu kebijakan dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya: adanya input yang berupa tuntutan serta dukungan, kemudian pemerintah sebagai aktor, serta adanya output berupa keputusan dan adanya dampak kepada lingkungan dalam hal ini yang terkena dampak bisa saja masyarakat.

Tuntutan tidak akan bisa dipenuhi atau konflik mengenai tujuan tidak akan diselesaikan apabila dalam tuntutannya tidak ada keputusan dari

⁶ Mohtar Mas' oed, Colin Mac Andrews, Perbandingan sistem politik, UGM Press:Yogyakarta,Maret 2006, Hal: 31.

pemerintah .⁷ Dalam tuntutananya, pemerintah Indonesia banyak mengeluarkan keputusan yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah, perusahaan swasta maupun masyarakat yang akan melakukan pengeksporan. Salah satunya adalah Pemerintah Indonesia mengharuskan kadar timah yang diekspor harus 99,85 persen (%). Tujuannya adalah untuk menjamin kualitas komoditi timah yang akan di ekspor. Sehingga nilai tambahnya bisa dimasukkan menjadi pemasukan dalam negeri. Selain itu, peningkatan kadar timah ini juga dimaksudkan karena dalam pasaran internasional, kadar timah yang dapat diekspor adalah sebesar 99.85 %.

Aturan itu telah mendorong harga timah batangan dunia dari sekitar 8.000 dolar AS per ton menjadi melebihi batas 15.000 dolar AS per ton pada Agustus 2007. Karena itu, diprediksikan nilai ekspor timah 2007 tetap dapat menyamai tahun lalu yang mencapai 913 juta dolar AS. Dari segi harga, secara devisa bisa sama dengan tahun lalu yang mendekati satu miliar dolar AS. Data terakhir sampai dengan September, nilai ekspor timah mencapai 715,7 juta dolar AS dari volume 51.742 ton. Jadi masih ada harapan hingga akhir tahun.

8

Dengan adanya tuntutan dari pasaran internasional mengenai kadar timah yang diekspor tentunya membuat pemerintah melakukan cara agar timah Bangka dapat diekspor yang tentunya akan menghasilkan keuntungan bagi pemerintah Indonesia sendiri. Tuntutan tersebut kemudian membuat

⁷ *Ibid*, hal 11

pemerintah Indonesia mengeluarkan sebuah keputusan untuk menangani ekspor timah. Dengan adanya penanganan yang serius dari pemerintah Indonesia dalam menangani ekspor maka akan semakin meningkatkan kualitas timah. Meningkatnya kualitas timah akan meningkatkan volume ekspor yang tentunya akan berakibat pada meningkatnya pendapatan daerah Bangka maupun pendapatan Indonesia.

Dengan adanya hubungan yang saling menguntungkan tersebut perlu adanya penanganan serius dari pemerintah Indonesia dalam menangani ekspor timah Bangka ini. Berbagai langkah harus diupayakan oleh pemerintah agar timah ini dapat terus menguntungkan bagi negara. Melalui departemen perdagangan, pemerintah mengupayakan berbagai langkah agar volume ekspor ini dapat terus ditingkatkan.

Menteri Perdagangan, Mari Pangestu, menyampaikan kajian atas kinerja ekspor pada tahun 2006, tantangan yang akan dihadapi tahun 2007 dan langkah-langkah yang diusulkan Depdag (Departemen Perdagangan) untuk meningkatkan ekspor. Kunci dari keberhasilan upaya peningkatan ekspor adalah koordinasi semua pihak, baik antar instansi pemerintah, maupun antara instansi pemerintah dengan dunia usaha termasuk lembaga-lembaga pembiayaannya. "Pada tahun 2006, kinerja ekspor Indonesia mencapai rekor baru di atas US\$100 milyar. Namun tahun ini tantangan yang dihadapi akan semakin berat, baik karena faktor eksternal maupun internal. Oleh karena itu dibutuhkan kerja keras dan dukungan lintas sektoral agar pertumbuhan ekspor

⁸ Antara News, Ekspor Timah 2007 Diperkirakan Hanya Mencapai 85.000 Ton, 04 Oktober 2007

yang dalam beberapa tahun terakhir telah berperan mendorong peningkatan kapasitas, pertumbuhan ekonomi nasional dan penyerapan tenaga kerja dapat tetap terjaga"⁹

Perdagangan sebagai sektor strategis berperan dalam mendukung kelancaran penyaluran arus barang dan jasa, memenuhi kebutuhan pokok rakyat serta mendorong pembentukan harga yang wajar dan mekanis pasar, juga dapat berperan aktif serta berjalan efektif supaya dalam perdagangan dunia akan mendorong realokasi sumber kearah yang lebih bebas dan lebih baik supaya memungkinkan terjadinya kemakmuran dan kesejahteraan sebuah negara. Pembangunan perdagangan sebagai upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan, memberikan sumbangan yang besar terhadap peningkatan pendapatan dan dalam perluasan kesempatan kerja. Di samping itu, pembangunan perdagangan memberikan kontribusi dalam menciptakan dan mempertahankan stabilitas ekonomi, mengendalikan inflasi dan mengamankan neraca pembayaran.

Industri penambangan ini merupakan salah satu mata dagang ekspor yang berpotensi sebagai alat pemenuhan kebutuhan atau penyangga hidup yang eksklusif, baik itu untuk masyarakat setempat (Daerah) maupun negara, sebab tingkatan baik dari produksi maupun pemasarannya maka diharapkan dapat berperan menambah devisa guna menunjang kelancaran pelaksanaan pembangunan nasional.

⁹ Rapat Kerja Terbatas Wapres Dengan Depdag "Skenario Optimis Pertumbuhan Ekspor Tahun Ini 14,5%", Februari 2007

D. Hipotesa

Dari permasalahan yang ada, kemudian didukung oleh kerangka pemikiran pada teori dan konsep yang ada, di mana Pemerintah Indonesia dalam menangani produk timah di Bangka-belitung. Maka penelitian akan memberi hipotesa :

- a. Pembentukan dan pengembangan *Nasional Single Window* (NSW) dan *ASEAN Single Window* (ASW),
- b. Penyelenggaraan Pusat Promosi Dagang Indonesia (ITPC).

E. Tujuan Penulisan

Penulisan skripsi ini bertujuan ;

1. Untuk menjawab rumusan masalah dengan teori yang relevan dan membuktikan hipotesa yang ada dengan fakta dan data.
2. Untuk menganalisa Bagaimana Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam menangani atau meningkatkan ekspor timah yang ada di Bangka Belitung.
3. Untuk mengetahui seberapa jauh Ekspor Timah Bangka, baik itu Dalam Negeri maupun Luar Negeri.

F. Jangkauan Penelitian

Dalam Penelitian ini menggunakan data dari tahun 2002-2007 dimana pada tahun itu ekspor timah mulai dikenal oleh masyarakat luar dalam arti berkembang dan mampu memasuki pasar global sampai tahun 2007, tetapi

tidak menutup kemungkinan untuk menggunakan data sebelum atau sesudahnya.

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan penulis untuk mendapatkan data-data untuk kepentingan penelitian ini adalah dengan cara studi pustaka dan dokumentasi data sekunder yang diperoleh dari riset lapangan dengan mengadakan penelitian terhadap objek penelitian dengan cara memperoleh dokumen, Arsip, Report, Interview, Buku, Literature Makalah dan berbagai laporan-laporan yang terkait dalam penambangan timah untuk perdagangan menembus pasar Global serta digunakan sebagai acuan dan kerangka pedoman teori untuk mengkaji masalah yang akan diteliti dan selain itu penulis memperoleh data-data dengan cara observasi via Internet.

G. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini dalam Pendahuluan membahas mengenai Alasan Pemilihan Judul, Tujuan Penulisan, Latar Belakang Masalah, Kerangka Pemikiran, Hipotesa, Tehnik Pengumpulan Data, dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN WILAYAH

Bab ini dalam tinjauan wilayah membahas tentang Batas-batas Administrasi dan letak Geografis, Tata guna lahan, Keadaan alam, Kependudukan dan pola jaringan transportasi.

BAB III TIMAH SEBAGAI SUMBER DAYA ALAM (SDA) UNGGULAN

Bab ini menjelaskan Sumber daya alam Bangka-Belitung, dan Kontribusi timah terhadap kabupaten Bangka-Belitung.

BAB IV PENANGANAN PRODUK TIMAH DI BANGKA-BELITUNG OLEH PEMERINTAH INDONESIA

Bab ini menjelaskan tentang bagaimana Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam menangani produk Timah di Bangka-Belitung tahun 2007.

- a. Pembentukan dan pengembangan *National Single Window* (NSW) dan *ASEAN Single Window* (ASW),
- b. Penyelenggaraan Pusat Promosi Dagang Indonesia (ITPC);

BAB V KESIMPULAN

Bab ini membahas kesimpulan baik itu kritik maupun saran yang diperoleh selama penelitian.